

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kecurangan adalah sebuah permasalahan yang sulit dihindarkan dalam organisasi. Setiap organisasi tentunya terdapat kecurangan yang mungkin terjadi baik kecurangan yang berskala kecil maupun kecurangan berskala besar. Kecurangan atau dalam bahasa audit disebut *fraud* merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau pihak lain dengan cara tertentu (Purnamawati, 2018).

*Fraud* menjadi permasalahan yang serius hingga saat ini. Sangat sulit menemukan organisasi atau lembaga perusahaan yang benar-benar bersih terbebas dari kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*). Banyaknya kasus-kasus kecurangan yang ada dilakukan oleh oknum karyawan dari golongan atas maupun golongan bawah. Oleh karena itu, diperlukan sikap kepedulian dari berbagai pihak untuk sadar dan waspada di lingkungan tempat bekerja sebagai bentuk antisipasi untuk dapat meminimalisir dan mencegah kasus-kasus kecurangan agar tidak terjadi kembali.

(Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter, 2019) melakukan penelitian terhadap *fraud* yang terjadi di Indonesia. Survei tersebut membahas banyak hal tentang *fraud* yang terjadi di Indonesia, salah satunya membahas tentang industri yang paling dirugikan dari adanya tindakan *fraud*. Berikut ini merupakan tabel industri yang paling dirugikan oleh *fraud* di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Industri yang paling dirugikan karena *fraud***

<b>Ranking</b>	<b>Jenis Industri</b>	<b>Presentase</b>
1	Industri Keuangan dan Perbankan	41,4%
2	Pemerintahan	33,9%
3	Industri Pertambangan	5,0%
4	Industri Kesehatan	4,2%
5	Industri Manufaktur	4,2%
6	Industri Lainnya	11,3 %

Sumber: *ACFE Indonesia Chapter* (2019)

(*Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter, 2019*)

menyebutkan bahwa industri keuangan dan perbankan sangat rentan terjadinya kasus *fraud* dibandingkan industri lainnya. Salah satu kasus *fraud* terbaru pada industri keuangan dan perbankan di Indonesia terjadi pada PT. Asabri (Persero) yang bergerang di bidang asuransi bagi TNI, Polri, dan ASN. Kasus ini berawal dari pembicaraan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu bapak Mahfud MD yang mengindikasikan bahwa telah terjadi dugaan kasus korupsi di PT. Asabri. Kasus ini menjerat nama besar seperti Benny Tjokrosaputro, Adam Rahmat Damiri, dan Heru Hidayat yang merugikan negara dengan angka yang fantastis sebesar Rp. 23,7 Triliun lebih besar dibandingkan kasus PT. Jiwasraya yaitu sebesar Rp. 16,8 Triliun. Kronologi terjadinya *fraud* dijelaskan bahwa Adam Rahmat Damiri (mantan direktur utama PT. Asabri) membuat kesepakatan dengan Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dimana merupakan orang luar dari PT. Asabri dan bukan seorang konsultan ataupun manajer investasi untuk mengelola portofolio investasi yang dimiliki oleh PT. Asabri dan menukar portofolio investasi yang dimiliki oleh PT. Asabri dengan portofolio yang dimiliki oleh Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dengan tujuan agar kinerja portofolio investasi PT. Asabri terlihat baik. Penyidik Kejaksaan Agung telah menyita aset

yang dimiliki oleh tersangka sebesar Rp. 15,2 Triliun, nilai ini lebih rendah dari kerugian yang dialami negara atas kasus korupsi ini yaitu lebih dari Rp. 20 Triliun (Finansialku, 2021).

Lembaga keuangan di Indonesia memiliki pengaruh besar dan berperan penting untuk mendukung perekonomian dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia guna memperoleh pertolongan pendanaan dan sebagai tempat untuk menyimpan uang. Desa Adat di Provinsi Bali memiliki lembaga keuangan yang terdapat pada masing-masing Desa Adat di Provinsi Bali yaitu Lembaga Perkreditan Desa. Pendirian Lembaga Perkreditan Desa atau LPD memiliki tujuan sebagai pendukung pembangunan ekonomi pedesaan. Berdasarkan bunyi dari peraturan Daerah No. 2 tahun 1998 dan No. 8 tahun 20022, Lembaga Perkreditan Desa didirikan pada setiap Desa Adat bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat desa dan menyediakan kredit bagi usaha dengan skala kecil. Pendirian Lembaga Perkreditan Desa juga bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit, untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi kegiatan usaha di tingkat Desa dan untuk meningkatkan tingkat monetasi di daerah Pedesaan.

Lembaga Perkreditan Desa termasuk dalam kelompok lembaga keuangan mikro yang pertumbuhannya meningkat setiap tahunnya. Lembaga ini berdiri pada wilayah Desa Adat, uang yang dikelola oleh Lembaga Perkreditan Desa merupakan dana milik masyarakat Desa. Lembaga Perkreditan Desa didirikan pada setiap desa adat bertujuan untuk mendukung perekonomian pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat Desa dan bertugas untuk menyediakan kredit bagi

usaha dengan skala kecil. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki tugas utama sebagai pengelola dana yang terhimpun dari masyarakat Desa tentu tidak luput dari kemungkinan terjadinya ancaman kecurangan.

Hingga kini, masih banyak ditemukan Lembaga Perkreditan Desa yang memiliki tingkat kesehatan yang rendah. Faktor utama ketidaksehatan Lembaga Perkreditan Desa disebabkan oleh tingginya tingkat kecurangan yang terjadi. Fenomena kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa yang menjadi perbincangan hangat masyarakat Bali akhir-akhir ini. data kasus kecurangan akuntansi terlampir pada lampiran 1.

Kasus *fraud* yang terjadi di Provinsi Bali banyak terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa. Dari data kasus pada lampiran 1 terdapat 3 kasus *fraud* terjadi di Kabupaten Klungkung yaitu pada Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Ped, Kecamatan Nusa Penida, dimana Kejaksaan Negeri Klungkung telah menahan 2 tersangka atas kasus korupsi dana LPD. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa dari tindakan korupsi ini LPD Desa Adat Ped mengalami kerugian sebesar Rp. 4.421.632.060. Kasus kedua terjadi di Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Kejaksaan Negeri Klungkung menggelar pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi di LPD Desa Adat Bakas. Dari tindakan korupsi ini LPD Desa Adat Bakas mengalami kerugian sebesar Rp. 4,2 miliar, akan tetapi hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan (Antara Bali, 2021)).

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menyebutkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Klungkung sangat rentan terjadinya penyelewengan anggaran yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu lemahnya

sistem pengawasan internal yang dilakukan di masing-masing Lembaga Perkreditan di Kabupaten Klungkung. Pengelolaan keuangan yang tidak profesional dapat menjadikan celah bagi oknum untuk melakukan penyelewengan (IDN Times, 2022).

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan adalah kurang efektifnya pengendalian internal di suatu organisasi (Pujayani & Dewi, 2021). Dengan sistem pengendalian yang rendah maka dapat memicu terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) yang tinggi. Lemahnya pengendalian internal yang diterapkan dapat membuka peluang yang dimiliki seseorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Peluang yang cenderung luas akan mengakibatkan risiko terjadinya tindakan kecurangan akuntansi menjadi meningkat. Pengendalian internal yang baik dapat menutup atau meminimalisir peluang terjadinya tindakan kecurangan akuntansi.

Salah satu kasus yang terjadi di LPD Desa Bakas yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang lemah seperti kurangnya pengawasan yang dapat menimbulkan peluang untuk melakukan kecurangan. Pada kasus LPD Desa Adat Bakas disebutkan bahwa terdapat jaminan yang tidak sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan pada debitur, serta terdapat juga kredit warga dari luar Desa Adat Bakas. Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa dengan pengendalian internal yang lemah maka akan dapat membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Penelitian yang berkaitan dengan pengendalian internal dilakukan oleh Gustina, (2018) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Depi & Wahyuni, (2022) menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa dengan adanya penerapan pengendalian internal yang baik akan dapat mengurangi atau meminimalisir kasus *fraud* yang terjadi.

Kompetensi sumber daya manusia juga disebut sebagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *fraud*. *Fraud Diamond Theory* yang dirumuskan oleh (Wolfe & Hermanson, 2004) menyebutkan bahwa jika seseorang memiliki kemampuan yang baik maka dapat menyebabkan terjadinya *fraud*. Seseorang dengan kemampuan yang baik cenderung mengenali peluang agar dapat melakukan rencana untuk melakukan tindakan kecurangan dengan tepat. Hasil yang sama ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari & Musmini, (2022) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi yang menyebutkan bahwa semakin tinggi kompetensi, maka semakin besar tingkat kecurangan akuntansi. Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian yang oleh Sudariani & Yudiantara, (2021) yang menunjukkan bahwa kompetensi memiliki hasil yang negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi dimana semakin tinggi kompetensi pengelola, maka kecenderungan kecurangan akuntansi semakin rendah.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*) adalah tekanan, Tekanan (*pressure*) merupakan intensif yang memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Tekanan tersebut sebagian besar berasal dari tekanan kebutuhan *financial*. Kebutuhan ini dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat diselesaikan secara kolektif, tetapi perlu diselesaikan secara individual.

Tekanan *financial* diartikan sebagai masalah *financial* yang dihadapi seseorang yang diselesaikan dengan cara mencuri uang atau asset. Tekanan keuangan disebabkan oleh keserakahan, gaya hidup mewah, hutang, masalah kesehatan, dan kerugian keuangan. Tekanan Keuangan yang dihadapi seseorang dapat menjadikan motivasi untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners*, (2022) dengan judul *A Report to the Nations* terkait perilaku yang menyebabkan terjadinya *fraud* menunjukkan hasil bahwa gaya hidup mewah menduduki peringkat pertama sebagai penyebab terjadinya *fraud* dengan presentase sebesar 39% disusul kesulitan keuangan dengan presentase sebesar 25%. Penelitian yang berkaitan dengan tekanan keuangan dilakukan oleh Meliana & Hartono, (2019) menyebutkan bahwa 80% tindakan kecurangan yang dilakukan pada lembaga perbankan di Indonesia dipengaruhi oleh tekanan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprpta & Padnyawati, (2021) menunjukkan bahwa tekanan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) dimana jika tekanan keuangan yang dialami seseorang semakin meningkat maka tingkat risiko terjadinya kecurangan akan semakin tinggi. Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hormati & Pesudo, (2019) yang menunjukkan hasil bahwa tekanan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kesesuaian kompensasi juga disebut sebagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *fraud*. Adinda, (2015) mendefinisikan bahwa kompensasi merupakan bentuk imbalan atau balas jasa kepada karyawan dengan tujuan pemberian untuk memacu semangat karyawan dalam bekerja guna memenuhi kebutuhan pribadi, akan tetapi jika kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan

usaha yang dikeluarkan maka dapat memicu terjadinya persepsi ketidakadilan dalam pemberian kompensasi kemudian akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan akuntansi (*fraud*). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter*, (2019) menunjukkan bahwa 3,8% *fraud* yang terjadi di Indonesia terjadi karena ketidakpuasan atas gaji yang diterima. Penelitian yang berkaitan dengan kesesuaian kompensasi dilakukan oleh Septiana & Prasetyo, (2021) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari & Musmini, (2022) mendapat hasil bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi menunjukkan bahwa jika kesesuaian kompensasi semakin meningkat, maka tingkat kecurangan akuntansi semakin menurun. Sedangkan hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmi & Helmayunita, (2019) di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi.

Variabel bebas atau *independent* variabel dalam penelitian ini dapat dikaitkan dengan teori yang dikembangkan Wolfe & Hermanson, (2004) yaitu *Fraud Diamond Theory*. *Fraud Diamond Theory* menyebutkan bahwa terdapat 4 elemen yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud* yaitu elemen tekanan, kesempatan, pembenaran, dan kemampuan. Elemen dalam konsep *fraud diamond* ini kemudian diwakilkan oleh variable-variabel agar dapat diukur, yaitu tekanan (*pressure*) yang diwakilkan oleh variabel tekanan keuangan, variabel kesempatan (*opportunity*) diwakilkan oleh variabel sistem pengendalian internal, variabel rasionalisasi



(*razionalitation*) diwakilkan oleh dengan variabel kesesuaian kompensasi, dan variabel kemampuan (*capability*) diwakilkan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia.

Dalam hal ini, berdasarkan fenomena dan *research gap* dari penelitian yang sebelumnya yang digunakan untuk referensi dan sebagai data pendukung. Penulis tertarik untuk membuat kajian mengenai pengaruh pengaruh pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, tekanan keuangan dan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi. Dimana pada penelitian ini peneliti memilih Lembaga Perkreditan Desa se-Kabupaten Klungkung sebagai lokasi penelitian dengan alasan adanya bebrapa kasus kecurangan yang telah terjadi dan belum ada kajian penelitian terkait penyebab kecurangan yang terjadi pada LPD se-Kabupaten Klungkung.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari Sudariani & Yudiantara, (2021) dengan judul pengaruh kompetensi pengelola, keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana BUMDes di Kabupaten Buleleng. Kebaruan penelitian ini terletak pada variable independen yang ditambahkan yaitu variable tekanan keuangan. Variable pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan kesesuaian kompensasi diteliti kembali dikarenakan terdapat inkonseistensi hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Subjek pada penelitian terdahulu yaitu BUMDes di Kabupaten Buleleng sedangkan pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Lembaga Perkreditan Desa se-Kabupaten Klungkung.

Bedasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Tekanan Keuangan dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan Akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa se-Kabupaten Klungkung”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Bedasarkan pada uraian dari latar belakang masalahn penelitian yang sudah diuraikan di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Masih banyak ditemukan praktik-praktik kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa se-Kabupaten Klungkung.
2. Sistem pengendalian intenal di masing-masing LPD se-Kabupaten Klungkung masih lemah. Lemahnya sistem pengendalian internal dapat menjadikan celah dan membuka peluang bagi oknum untuk melakukan kecurangan.
3. ACFE Indonesia Chapter menyebutkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya *fraud* adalah tekanan keuangan yang terjadi karena gaya hidup yang mewah.
4. Ketidakpuasan atas gaji yang diterima dijadikan alat pembenaran untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Perbedaan gaji juga menjadi keceburuan antar karyawan yang mengakibatkan terjadinya *fraud*.
5. Masih terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh masing-masing variabel yaitu pengendalian internal, kompetensi sumber

daya manusia, tekanan *keuangan*, dan kesesuaian kompensasi dalam penelitian yang berkaitan dengan kecurangan akuntansi.

6. Belum terdapat penelitian terkait faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan pada LPD se-Kabupaten Klungkung, padahal sudah terjadi 2 kasus kecurangan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan dari pokok permasalahan dalam penelitian ini akan lebih mengungkapkan masalah mengenai Pengaruh pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, tekanan keuangan dan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa se-Kabupaten Klungkung.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa se-Kabupaten Klungkung?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa se-Kabupaten Klungkung?
3. Bagaimana pengaruh tekanan keuangan terhadap kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa se-Kabupaten Klungkung?
4. Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa se-Kabupaten Klungkung?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa se-Kabupaten Klungkung.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa se-Kabupaten Klungkung.
3. Untuk mengetahui pengaruh tekanan keuangan terhadap kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa se-Kabupaten Klungkung.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa se-Kabupaten Klungkung.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris menyangkut pengaruh pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, tekanan keuangan dan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa se-Kabupaten Klungkung.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Perkreditan Desa, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan mengetahui yang diduga kuat menjadi faktor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa se-Kabupaten Klungkung sehingga hasil penelitian ini dapat dianalisa untuk memperbaiki sistem kinerja yang kurang baik.

- b. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu, wawasan, dan informasi mengenai pengaruh pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, tekanan keuangan dan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa se-Kabupaten Klungkung.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat peneliti selanjutnya untuk dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

